

## **Konferensi Pers Nasib Petani Tembakau dan Buruh Industri Rokok Pasca Kenaikan Cukai, Harga Rokok, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)**

Pada hari Selasa, 25 Januari 2022, Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEB UI bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Center (MTCC) UNIMMA dan *The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union)*, menyelenggarakan konferensi pers bertajuk “Nasib Petani Tembakau dan Buruh Industri Rokok Pasca Kenaikan Cukai, Harga Rokok, dan DBH CHT.”. Narasumber dalam kegiatan ini ialah Bapak Sarno selaku Analis Pusat Kebijakan Pendapatan Negara pada Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan, Ibu Mariana D. Savitri selaku Kepala Sub Direktorat Dana Bagi Hasil pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Kementerian Keuangan, Bapak Defranco Dasilva Tavares selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dan Ibu Retno Rusdidjati selaku Ketua MTCC UNIMMA. Kegiatan ini dimoderatori oleh Abdillah Ahsan yang merupakan Direktur SDM UI dan dihadiri oleh sekitar 65 peserta yang berasal dari petani tembakau, perwakilan Dinas Tenaga Kerja dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, organisasi masyarakat sipil, dan rekan-rekan media.

Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi pertama oleh Bapak Sarno yang memaparkan salah satunya mengenai dukungan kebijakan fiskal untuk meminimalisir dampak rokok terhadap kesehatan dan kualitas SDM. Bapak Sarno menyampaikan *“dalam sisi struktur, telah dilakukan simplifikasi tarif cukai yang semula berjumlah 19 layer menjadi 8 layer pada tahun 2022 dan untuk tarif, disesuaikan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan. Secara rata-rata, kenaikan tarif ialah 12%, namun untuk SKT kenaikannya maksimal 4.5% karena ada pertimbangan terkait tenaga kerja.”* Dalam kesempatan selanjutnya, Bapak Sarno menyampaikan beberapa tantangan terkait perumusan kebijakan cukai hasil tembakau. Beliau menjelaskan bahwa sebagai salah satu instrumen fiskal, memerlukan sinergi dengan kebijakan non harga dan non fiskal. Dalam perumusan kebijakan, perlu memerhatikan berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, konsumsi, petani tembakau, tenaga kerja, rokok ilegal, dan penerimaan negara yang melahirkan kebutuhan akan *roadmap* komprehensif yang melibatkan banyak pihak untuk industri hasil pengolahan tembakau ke depannya untuk dijadikan panduan bersama.

Agenda konferensi pers ini dilanjutkan dengan pemaparan materi berikutnya yang disampaikan oleh Ibu Mariana yang menggambarkan Kebijakan Penggunaan DBH CHT TA 2022. Dalam sesinya, Ibu Mariana menyatakan bahwa *“dari hasil monitoring dan evaluasi, mendapatkan banyak masukan dari daerah-daerah penerima DBH CHT yang kondisinya sangat beragam, dimana ada yang butuh lebih banyak untuk kesehatan maupun pembinaan industri. Sehingga, di PMK 2021, diatur bahwa apabila ketersediaan anggaran melebihi kebutuhan, maka kelebihannya dapat dialihkan ke bidang yang lain. Dengan fleksibilitas tersebut, diharapkan dapat memenuhi keperluan setiap daerah kendati untuk dapat mengalihkan anggaran, perlu dipastikan semua prioritas program DBH CHT telah dilakukan, sehingga kepala daerah yang ingin melakukan pengalihan perlu menyampaikan surat ke pusat untuk ditinjau ulang terlebih dahulu.”* Pada kesempatan berikutnya, Ibu Mariana menyampaikan bahwa kebijakan DBH CHT TA 2022 mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan DBH CHT secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku, asas manfaat, efisiensi, dan efektivitas.

Bapak Frans sebagai narasumber berikutnya membahas penggunaan DBH CHT di Jawa Tengah. Beliau menyampaikan bahwa Jawa Tengah memperoleh 21.39% dari total alokasi DBH CHT nasional, menjadikan Jawa Tengah berada di posisi nomor 2 setelah Jawa Timur, sesuai dengan luas lahan dan jumlah produksi tembakau yang dihasilkan. Pada tahun 2018 sampai 2020, DBH CHT di Jawa Tengah digunakan untuk pelatihan dari BLK dan BPK pada tiga bidang yaitu industri, pertanian, dan kewirausahaan dengan

penyerapan hingga 95%. Pada tahun 2021 tidak ada pemberian bantuan pelatihan, tetapi dialihkan untuk bantuan langsung yang di dalamnya masih terdapat berbagai kendala kendati pendistribusian BLT DBH CHT sudah mencapai 98.4%. Penyebab kegagalan dalam pendistribusian BLT DBH CHT yang tersebar di 29 kabupaten di antaranya disebabkan oleh tidak ditemukannya kelompok penerima manfaat (KPM), KPM di luar kota, KPM ditemukan mampu, KPM meninggal tunggal, KPM menolak, atau sudah menerima bantuan lainnya. Dalam agenda tersebut, Bapak Frans turut menyampaikan aspirasi Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (PD FSP RTMM)-SPSI Jawa Tengah, *“dalam proses pembahasan peraturan gubernur, harus melibatkan PD FSP RTMM-SPSI Jawa Tengah.”* Selain itu, Bapak Frans juga menyampaikan bahwa *“dalam rapat PD FSP RTMM-SPSI Jawa Tengah, diharapkan BLT tetap ada terutama yang berhubungan langsung dengan proses produksi, diharapkan pula SKT akan tetap ada dan dibarengi dengan penelitian mengenai kadar “tar” untuk mengurangi pengangguran akibat penurunan produksi SKT”*.

Narasumber selanjutnya dalam agenda konferensi pers, Ibu Retno, menyampaikan penemuan beliau terkait evaluasi pemanfaatan DBH CHT untuk kesejahteraan petani tembakau di Jawa Tengah bahwa *“harga tembakau semakin menurun karena masalah cuaca dan tata niaga yang kurang baik. Namun, ketika petani ingin beralih tanam masih kurang didukung oleh kebijakan pemerintah yang sesuai seperti kebijakan impor bawang putih.”* Ibu Retno juga menyampaikan bahwa sebagian besar petani masih belum memahami hak mereka terkait dengan DBH CHT, dimana terdapat benturan pemahaman bahwa petani yang sudah menerima BLT tidak boleh menerima DBH CHT, sehingga pada akhirnya banyak petani yang gagal menerima DBH CHT.

Selanjutnya, kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta serta pemberian sambutan penutup oleh Bapak Abdillah Ahsan, Direktur SDM UI sekaligus Peneliti Senior di PEBS FEB UI. Abdillah dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, termasuk di dalamnya narasumber dan seluruh peserta yang hadir. Kemudian, Abdillah menambahkan bahwa forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penggunaan DBH CHT TA 2022 yang lebih optimal, terutama bagi para petani tembakau dan pekerja industri rokok.

---

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) merupakan institusi di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yang didedikasikan menjadi center of excellence untuk penelitian dan pelatihan sesuai kebutuhan akademik, industri, dan masyarakat. Saat ini, PEBS FEB UI bekerja sama dengan The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung rencana pemulihan pemerintah melalui reformasi perpajakan.

Narahubung:  
Abdillah Ahsan  
+62 815-1855-944  
[ahsanov@yahoo.com](mailto:ahsanov@yahoo.com).